

DAMPAK DIMENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Tesalonika Avemaria Ineari Manich¹, Weli²,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta
weli.imbiri@atmajaya.ac.id

Received: 3 Januari 2024; Revised: 4 Januari 2024; Published: 16 Januari 2024

Abstract

The purpose of this research is to analyze the impact of corporate social responsibility, as viewed from economic, environmental, and social dimensions, on tax avoidance practices. The research population comprises non-cyclical consumer sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2021. Data for this study were obtained from these companies' annual and sustainability reports. The research sample was selected using purposive sampling, resulting in 38 companies. Data analysis will involve Descriptive Statistical Analysis and Multiple Linear Regression Analysis using IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25.0. The results of the data analysis indicate that only the variables related to the economic and environmental dimensions of corporate social responsibility impact tax avoidance practices. In contrast, social size does not influence tax avoidance practices.

Key Words: Tax Avoidance, CSR, Sustainability, Economic dimension, Environmental dimension, social dimension

PENDAHULUAN

Persoalan pembayaran pajak selalu menjadi isu yang kontroversial antara kepentingan negara dan perusahaan. Pemerintah akan selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak, disisi lain perusahaan akan mengupayakan penghindaran pajak dengan cara melakukan perencanaan atau manajemen pajak (Darmawan & Sukartha, 2014). Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk manajemen keuangan untuk meminimalkan pajak terutang pada tahun berjalan dan tahun buku berikutnya (Dinah & Darsono, 2017). Kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan memang menguntungkan namun disisi lain itu merugikan negara dengan membuat pendapatan dari penerimaan pajak negara berkurang (Jessica & Toly, 2014). Sedangkan pajak adalah sumber pendapatan publik yang berguna untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa dan untuk membantu masyarakat Indonesia.

Preuss (2010) berpendapat bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berkaitan dengan penghindaran pajak, karena tanggung jawab sosial tidak lebih dari alasan bisnis sederhana untuk mengabaikan aspek kontribusi ekonomi bagi masyarakat. Namun, Huseynov dan Klamm (2012) berpendapat bahwa dalam beberapa kasus perilaku menurunkan pembayaran pajak dapat diterima secara sosial karena dengan meningkatnya profitabilitas, maka perusahaan berada dalam keadaan stabil untuk melakukan tanggung jawab sosialnya (Huseynov dan Klamm, 2012).

Semua keputusan perusahaan harus dapat memberikan keyakinan bagi banyak pihak, dan keyakinan tersebut harus disertai dengan perilaku yang benar. Dalam hal ini perilaku tersebut adalah dengan tidak melakukan tindakan manipulasi supaya dapat mempertahankan reputasi yang baik, dengan menempatkan hubungan negatif antara

pengungkapan tanggung jawab sosial dengan praktik penghindaran pajak yang agresif. Namun ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa ada perusahaan yang dengan sengaja meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial mereka untuk melindungi nilai perusahaan terhadap risiko reputasi apapun yang mungkin timbul dari praktik penghindaran pajak yang agresif.

Studi tentang hubungan antara penghindaran pajak dan CSR telah dieksplorasi oleh berbagai peneliti, dan hasil studi tersebut bervariasi. Menurut (Merkusiwati & Eka Damayanthi, 2019) CSR dan penghindaran pajak memiliki pengaruh sejajar, karena semakin tinggi pengungkapan CSR maka penghindaran pajak akan semakin besar. Perusahaan menilai melakukan CSR sebagai beban dari praktik pajak dan tidak menganggap aktivitas tersebut sebagai kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Disisi lain dalam penelitian (Sari & Adiwibowo, 2017) semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini juga didukung pernyataan yang sama oleh Lanis dan Richardson (2011) serta Hoi et al (2013) dimana perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah akan semakin tinggi dalam penghindaran pajak.

Sebagian besar penelitian terdahulu tidak membedakan CSR menurut dimensinya yaitu dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi sosial seperti penelitian oleh (Sandra & Anwar, 2018) dan (Budhi et al., 2017). Oleh karena itu penelitian ini mencoba menganalisis menurut dimensi tanggung jawab sosial yang meliputi dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial untuk mendapat jawaban yang lebih spesifik terkait hubungan tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak CSR yang dirinci dari tiga dimensinya yaitu dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian ini didasari dengan Teori pemangku kepentingan (Stakeholder Theory). Teori *stakeholder* pertama kali diusulkan oleh R. Edward Freeman dalam artikelnya yang berjudul "Strategic Management: A Stakeholder Approach," yang diterbitkan pada tahun 1984 (Hörisch et al., 2020; Huang, 2022). Dalam artikel tersebut, Freeman mengembangkan konsep *stakeholder* dan menyajikan argumen mengenai pentingnya memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam pengelolaan perusahaan. "Teori *stakeholder* menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai kelompok yang memiliki kepentingan atau dapat memengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Sesuai dengan konsep teori pemangku kepentingan tersebut maka CSR dan penghindaran pajak menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh Perusahaan. Bagaimana kebijakan pajak perusahaan dapat mempengaruhi *stakeholders*, termasuk apakah kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang bertanggung jawab atau tidak.

Tanggung Jawab Sosial

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial merupakan komitmen bisnis berkepanjangan yang berkontribusi untuk ekonomi serta mempengaruhi lingkungan serta penduduk guna meningkatkan mutu serta keberlangsungan hidup publik ataupun untuk pembangunan, melalui kerjasama dengan pihak - pihak berkepentingan.

Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 1 Paragraf 9 mengusulkan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Deklarasi PSAK tersebut

akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan deklarasi tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersaji dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur jika industri yang melakukan aktivitas atau kegiatan operasional yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Peraturan ini dinilai sangat penting untuk mendukung pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan. Tujuan penetapan aturan atau standar absolut ini adalah agar perusahaan dapat menerapkan kebijakan yang melampaui peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Namun tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan memiliki beragam motif seperti dapat memperluas peluang pasar, menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan yang bersangkutan, agar sesuai dengan regulasi yang ada, meningkatkan reputasi dan memperoleh keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) serta melegitimasi aktivitas perusahaan (Hadi, 2010).

Selanjutnya berdasarkan sudut pandang Teori Legitimasi pada dasarnya perusahaan berusaha membangun citra positif di depan publik dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial bukan untuk menghindari pajak (Ningrum et al., 2018). Teori tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak sendiri menyiratkan hal yang kompleks akan hubungan keduanya, dalam penelitian (Preuss, 2010) menyatakan bahwa pembayaran pajak oleh perusahaan merupakan kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Preuss, 2010 berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak lebih dari penutup ketika perusahaan mengabaikan tugas mereka untuk memberikan kontribusi keuangan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Namun (Huseynov & K.Klamm, 2012) berpendapat bahwa dalam beberapa kasus membayar secara sosial dapat diterima, karena pembayaran pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan profitabilitas, sehingga ini dapat membantu perusahaan untuk lebih terlibat dalam kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial.

Tanggung Jawab Sosial Dimensi Ekonomi

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam *Global Reporting Initiative* (GRI) memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Perusahaan sering kali menghadapi masalah baik dengan pemasok maupun dengan pelanggan, dan tanggung jawab sosial dimensi ekonomi adalah alat yang dipakai untuk menangani perkara-perkara yang bisa terjadi lantaran hubungan perusahaan menggunakan kedua pihak tersebut. Perilaku dari kegiatan bisnis sebuah perusahaan dipakai sebagai sarana untuk melihat apakah perusahaan mampu menggabungkan antara masalah tanggung jawab ekonomi dengan pengambilan keputusan dan struktur organisasi.

Oleh karena itu, perusahaan yang cenderung dekat dengan pemegang saham dan sangat terlibat akan memiliki penghindaran pajak yang lebih besar. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya, terutama oleh (Laguir et al., 2015) dan (Mohanadas et al., 2019) menemukan bahwa tingginya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam dimensi ekonomi sejalan dengan tingginya tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Dimensi Lingkungan

Penilaian tanggung jawab sosial dimensi lingkungan bergantung pada pengurangan sumber daya perusahaan (Ribando & Bonne, 2010) dan berfokus pada penerapan sistem manajemen yang sistematis dalam pengelolaan lingkungan guna membangun kredibilitas

perusahaan dimata investor dan pemegang kepentingan lainnya. Beberapa penelitian telah dilakukan guna meneliti kaitan antara tanggung jawab sosial dimensi lingkungan dengan aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan. Ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh (Lanis & Richardson, 2012) dan (Laguir et al., 2015) yang meneliti tanggung jawab sosial dimensi lingkungan dan kaitannya dengan penghindaran pajak perusahaan, namun hasilnya tidak signifikan dan tidak ada hubungan antar keduanya. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh (Renselaar, 2016) penulis menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang melakukan pengurangan dari segi sumber daya, seperti pengurangan emisi serta inovasi pada produknya.

Tanggung Jawab Sosial Dimensi Sosial

Tanggung jawab sosial dimensi sosial secara umum berkaitan dengan bagaimana perusahaan berkinerja secara sosial dengan didasari pada hal - hal seperti kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pengembangan karyawan, keberagaman, hak asasi manusia, tanggung jawab produk dan tanggung jawab kepada masyarakat (Ribando & Bonne, 2010) Dimensi sosial dalam hal ini berarti merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial yang timbul akibat aktivitas perusahaan dilakukan sebagai bentuk upaya perusahaan dalam menghargai kesejahteraan masyarakat. Menurut (Semuel & Wijaya, 2008) ada dua hal yang terlibat dalam dimensi sosial yaitu: pertama, Labour Practises yang berkaitan perlakuan perusahaan terhadap para pekerjanya. Kedua, Social Activities, meliputi kontribusi perusahaan untuk lembaga sosial dengan memberikan sumbangan ataupun hal lainnya yang serupa (Corporate Philanthropy), mendukung komunitas organisasi dengan turut andil mendorong para pekerja, rekan bisnis ataupun anggota perusahaannya (Community Volunteering), dan memberikan donasi dan kontribusi dari sebagian pendapatannya dari aktivitas perusahaan.

Penelitian terkait hubungan antara tanggung jawab sosial dimensi sosial juga diakomodasi oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Laguir et al., 2015) serta (Watson, 2011) menunjukkan bahwa derajat tanggung jawab sosial dimensi sosial berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan, semakin rendah pengungkapan tanggung jawab sosial dimensi sosial oleh perusahaan maka semakin agresif perusahaan terhadap pajak.

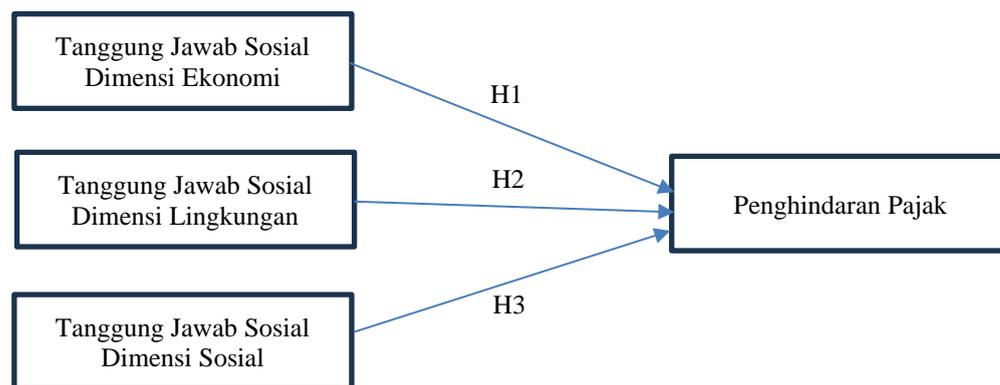
Studi sebelumnya mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak sangat bervariasi dalam objek penelitian ataupun metode penelitian, sehingga menghasilkan perbedaan pada hasil penelitian seperti yang diringkas pada Tabel 1. Oleh karena itu model penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Independen Variabel	Hubungan dengan Penghindaran Pajak
Septianto & Muid	2020		Berpengaruh Negatif
Laguir et al	2015	Tanggungjawab Sosial Dimensi Ekonomi	Berpengaruh Positif
Ranselaar	2016		
Sari & Adiwibowo	2017		
Mohanadas et al	2019		
Ranselaar	2016	Tanggungjawab Sosial	Berpengaruh Positif
Septianto & Muid	2020	Dimensi Lingkungan	

Huseynov & Klamm	2012		
Lanis	2013		
Laguir et al	2015	Tanggungjawab Sosial Dimensi Sosial	Berpengaruh Negatif
Ranselaar	2016		
Sari & Adiwibowo	2017		
Mohanadas et al	2019		
Septianto & Muid	2020		

Sumber: Data yang diolah penulis



Gambar 1. Model Penelitian

Pengaruh CSR Dimensi Ekonomi terhadap Praktik penghindaran Pajak

Penelitian terkait hubungan variabel CSR dimensi ekonomi dengan penghindaran pajak terbilang masih sedikit, dan memberi hasil yang berbeda antar peneliti. Hasil studi Septianto & Muid (2020) menunjukkan dimensi ekonomi dari tanggung jawab sosial mempunyai dampak negatif dengan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Laguir et al. (2015), Mohanadas et al. (2019), Renselaar (2016), dan Sari & Adiwibowo (2017) menemukan tanggung jawab sosial dimensi ekonomi berpengaruh positif dengan penghindaran pajak. Penelitian lainnya (Sari & Adiwibowo, 2017) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dimensi ekonomi yang tinggi terkait dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi.

Berdasarkan hasil studi yang diuraikan diatas, maka dapat diduga bahwa CSR untuk dimensi ekonomi yang diungkapkan secara luas berpengaruh pada praktik penghindaran pajak yang lebih agresif sehingga rumusan hipotesis penelitian pertama adalah:

H1: CSR dimensi ekonomi berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan

Pengaruh CSR Dimensi Lingkungan terhadap Praktik penghindaran Pajak

Penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh CSR dimensi lingkungan dengan praktik penghindaran pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan Watson (2011) dan Lanis et al. (2013). Namun penelitian Septianto & Muid (2020) mendapatkan CSR dimensi lingkungan berdampak positif terhadap praktik penghindaran pajak, penelitian ini juga diakomodasi oleh penelitian sebelumnya (Renselaar, 2016) yang menegaskan bahwa perusahaan menurunkan emisi, sumber daya dan inovasi produk cenderung menghindari

penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Septianto & Muid (2020) menjelaskan bahwa variabel CSR dimensi lingkungan berhubungan secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian hipotesis penelitian kedua adalah sebagai berikut:

H2: CSR dimensi lingkungan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Dimensi Sosial terhadap Praktik penghindaran Pajak

Hasil Penelitian sebelumnya terkait pengaruh tanggung jawab sosial dimensi sosial terhadap praktik penghindaran pajak mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial dimensi sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Laguir et al. (2015), Lanis et al. (2013), Huseynov & K.Klamm (2012), Sari & Adiwibowo (2017), dan Septianto & Muid (2020). Oleh karena itu hipotesis penelitian ketiga adalah sebagai berikut:

H3: CSR dimensi sosial berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini diambil dari laporan keberlanjutan, laporan keuangan serta *annual report* tahun 2018 hingga 2021 perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* kategori papan utama yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/>) dan situs resmi masing-masing perusahaan. Adapun pemilihan sample penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan rincian seperti pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sample

No	Keterangan	Jumlah
1	Data perusahaan manufaktur sektor <i>consumer non-cyclicals</i> kategori papan utama dari tahun 2018 - 2021	171
2	Data perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan lengkap	-32
3	Data perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah	-8
4	Data perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2018 - 2021	-46
5	Data perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2018 - 2021	-30
Jumlah data perusahaan memenuhi kriteria		55
Data <i>Outlier</i>		-17
Jumlah data diolah		38

Sumber: Data yang diolah penulis

Definisi Operasional Variabel Penghindaran Pajak

Variabel Penghindaran pajak menggambarkan upaya perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak mereka ke yurisdiksi pajak yang dihitung menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). ETR mengukur kemampuan entitas dalam membayar pajak dibandingkan dengan pendapatan sebelum pajak. Semakin rendah ETR *Value Ratio* menunjukkan peningkatan penghindaran pajak perusahaan dan sebaliknya semakin tinggi ETR *Value Ratio* menunjukkan peningkatan penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2012).

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots 1)$$

Dimensi ekonomi

Adalah variabel kegiatan CSR yang dilihat dari dimensi ekonomi berdasarkan Indikator pada GRI 201 tahun 2016 sebanyak 17 pernyataan, terdiri dari:

- A. GRI 201(2016) - Kinerja Ekonomi, yaitu:
 - 1) 201-1 terkait nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
 - 2) 201-2 terkait implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim.
 - 3) 201-3 terkait kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya.
 - 4) 201-4 terkait bantuan finansial yang diterima dari pemerintah

- B. GRI 202 (2016) - Keberadaan Pasar, yaitu:
 - 1) 202-1 terkait rasio standar upah karyawan *entry-level* berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
 - 2) 202-2 terkait proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal

- C. GRI 203 (2016) - Dampak Ekonomi Tidak Langsung, yaitu:
 - 1) 203-1 terkait investasi infrastruktur dan dukungan layanan
 - 2) 203-2 terkait dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan

- D. GRI 204 (2016) - Praktik Pengadaan, yaitu:
 - 1) 204-1 terkait Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal

- E. GRI 205 (2016) - Anti Korupsi, yaitu:
 - 1) 205-1 terkait operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
 - 2) 205-2 terkait komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi
 - 3) 205-3 terkait insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

- F. GRI 206 (2016) - Perilaku anti-persaingan, yaitu:
 - 1) 206-1 terkait langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik *anti-trust* dan monopoli

- G. GRI 207 (2016) - Pajak, yaitu:
 - 1) 207-1 terkait Pendekatan terhadap pajak
 - 2) 207-2 terkait tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak
 - 3) 207-3 terkait keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak

- 4) 207-4 terkait laporan per negara

Dimensi lingkungan

Adalah variabel kegiatan CSR yang dilihat dari dimensi ekonomi berdasarkan Indikator pada DRI tahun 2016 sebanyak 32 pernyataan, meliputi:

A. GRI 301 (2016) - Material, yaitu:

- 1) 301-1 terkait material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
- 2) 301-2 terkait material input dari daur ulang yang digunakan
- 3) 301-3 terkait produk *reclaimed* dan material kemasannya

B. GRI 302 (2016) - Energi, yaitu:

- 1) 302-1 terkait konsumsi energi dalam organisasi
- 2) 302-2 terkait konsumsi energi di luar organisasi
- 3) 302-3 terkait intensitas energi
- 4) 302-4 terkait pengurangan konsumsi energi
- 5) 302-5 terkait pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa

C. GRI 303 (2016) - Air dan Efluen, yaitu:

- 1) 303-1 terkait interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
- 2) 303-2 terkait manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
- 3) 303-3 terkait pengambilan air
- 4) 303-4 terkait pembuangan air
- 5) 303-5 terkait konsumsi air

D. GRI 304 (2016) - Keanekaragaman hayati, yaitu:

- 1) 304-1 terkait lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
- 2) 304-2 terkait dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
- 3) 304-3 terkait habitat yang dilindungi atau direstorasi
- 4) 304-4 terkait spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi

E. GRI 305 (2016) - Emisi, yaitu:

- 1) 305-1 terkait emisi GRK (cakupan 1) langsung
- 2) 305-2 terkait emisi energi GRK (cakupan 2) tidak langsung
- 3) 305-3 terkait emisi energi GRK (cakupan 3) tidak langsung lainnya
- 4) 305-4 terkait intensitas emisi GRK
- 5) 305-5 terkait pengurangan emisi GRK
- 6) 305-6 terkait emisi zat perusak ozon (ODS)
- 7) 305-7 terkait Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya

F. GRI 306 (2016) - Limbah, yaitu:

- 1) 306-1 terkait timbulan limbah dan dampak-dampak yang signifikan terkait limbah
- 2) 306-2 terkait pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah
- 3) 306-3 terkait timbulan limbah
- 4) 306-4 terkait limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir

- 5) 306-5 terkait limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
- G. GRI 307 (2016) – Kepatuhan Lingkungan, yaitu:
- 1) 307-1 terkait ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
- H. 308 (2016) – penilaian lingkungan pemasok, yaitu:
- 1) 308-1 terkait seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
 - 2) 308-2 terkait dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil

Dimensi sosial

Adalah variabel kegiatan CSR yang dilihat dari dimensi ekonomi berdasarkan Indikator pada DRI tahun 2016 sebanyak 40 pernyataan, meliputi:

- A. GRI 401 (2016) – Kepegawaian, yaitu:
- 1) 401-1 terkait perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
 - 2) 401-2 terkait tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
 - 3) 401-3 terkait cuti melahirkan
- B. GRI 402 (2016) – Hubungan tenaga kerja/manajemen, yaitu:
- 1) 402-1 terkait periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
- C. GRI 403 (2016) – Keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu:
- 1) 403-1 terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
 - 2) 403-2 terkait pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
 - 3) 403-3 terkait layanan kesehatan kerja
 - 4) 403-4 terkait partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja
 - 5) 403-5 terkait pelatihan pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
 - 6) 403-6 terkait peningkatan kualitas kesehatan pekerja
 - 7) 403-7 terkait pencegahan dan mitigasi dampak-dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
 - 8) 403-8 terkait pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
 - 9) 403-9 terkait kecelakaan kerja
 - 10) 403-10 terkait penyakit akibat kerja
- D. GRI 404 (2016) – Pelatihan dan Pendidikan, yaitu:
- 1) 404-1 terkait rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
 - 2) 404-2 terkait program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
 - 3) 404-3 terkait persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
- E. GRI 405 (2016) – Keanekaragaman dan kesempatan setara, meliputi:
- 1) 405-1 terkait keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
 - 2) 405-2 terkait rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki

F. GRI 406 (2016) - Non-Diskriminasi, yaitu:

- 1) 406-1 terkait insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan

G. GRI 407 (2016) - Kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, yaitu:

- 1) 407-1 terkait operasi dan pemasok dimana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko

H. GRI 408 (2016) - Pekerja anak, yaitu:

- 1) 408-1 terkait operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak

I. GRI 409 (2016) - Kerja paksa atau wajib kerja, yaitu:

- 1) 409-1 terkait operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja

J. GRI 410 (2016) - Praktik keamanan, yaitu:

- 1) 410-1 terkait petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia

K. GRI 411 (2016) - Hak-hak masyarakat adat, yaitu:

- 1) 411-1 terkait insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat

L. GRI 412 (2016) - Penilaian hak asasi manusia, yaitu:

- 1) 412-1 terkait operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
- 2) 412-2 terkait pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
- 3) 412-3 terkait perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia

M. GRI 413 (2016) - Masyarakat lokal, yaitu:

- 1) 413-1 terkait operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
- 2) 413-2 terkait operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal

N. GRI 414 (2016) - Penilaian sosial pemasok, yaitu:

- 1) 414-1 terkait seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
- 2) 414-2 terkait dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil

O. GRI 415 (2016) - Kebijakan publik, yaitu:

- 1) 415-1 terkait kontribusi politik

P. GRI 416 (2016) - Kesehatan dan keselamatan pelanggan

- 1) 416-1 terkait penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
- 2) 416-2 terkait insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa

Q. GRI 417 (2016) - Pemasaran dan pelabelan, yaitu:

- 1) 417-1 terkait persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
- 2) 417-2 terkait insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
- 3) 417-3 terkait insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran

R. GRI 418 (2016) - Privasi Pelanggan

- 1) 418-1 terkait pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

S. GRI 419 (2016) - Kepatuhan sosial ekonomi

- 1) 419-1 terkait ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

Skor untuk masing-masing dimensi akan akumulasi dari total skor seluruh pernyataan yang diungkapkan pada laporan berkelanjutan, laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2018 hingga 2021. Cara menilai adalah, Jika pernyataan ada dalam pengungkapan maka akan diberi nilai 1, dan jika tidak ada unsur tersebut mendapat nilai 0, sehingga rentang skor mulai dari 0 hingga jumlah pernyataan pada masing-masing dimensi.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik analisis konten dari *sustainability report*, *financial report* dan *annual report* perusahaan manufaktur kategori utama *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dengan batasan perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian selama periode laporan. Hal ini dikarenakan jika perusahaan mengalami kerugian akan merusak sampel dan memiliki ETR negatif. Sedangkan untuk analisis data akan menggunakan model analisis statistika deskriptif dan regresi linear berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program IBM *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25.0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistika Deskriptif

Hasil analisis untuk deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std Deviation
X1 Dimensi Ekonomi	38	-0.059	0.118	0.01238	0.039062
X2 Dimensi Lingkungan		-0.156	0.469	0.06250	0.142929
X3 Dimensi Sosial		-0.175	0.425	0.05987	0.128471
Y Penghindaran Pajak		-0.169	0.049	-0.02453	0.046021

Sumber: Output SPSS diolah penulis

Informasi yang diringkas pada Tabel 3, menjelaskan nilai terendah untuk skor dimensi ekonomi (X1) berasal dari PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk tahun 2020/ 2021 yaitu sebesar -0.059, ini berarti bahwa skor pada tahun t lebih rendah sebesar 0.059 dibandingkan skor pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk skor tertinggi dimiliki oleh Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2020/2021, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2020/2021, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tahun 2019/2020, dan PT Kino Indonesia Tbk tahun 2020/2021 dengan skor 0.118, yang artinya perusahaan tersebut mengalami peningkatan dalam mengungkapkan informasi dimensi ekonomi pada tahun t dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikutnya untuk dimensi lingkungan (X2) Nilai terendah ada pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2019/2020 dengan nilai skor tahun t dikurang dengan tahun t-1 adalah -0.156, ini berarti bahwa skor pada tahun t lebih rendah sebesar 0.059 dibandingkan skor pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk skor tertinggi dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2020/2021 dengan skor 0.469 yang artinya perusahaan tersebut mengalami peningkatan dalam mengungkapkan informasi dimensi ekonomi pada tahun t dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk dimensi sosial (X3) Nilai terendah ada pada PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2018/2019 dengan nilai skor tahun t dikurang dengan tahun t-1 adalah -0.175, ini berarti bahwa skor pada tahun t lebih rendah sebesar 0.059 dibandingkan skor pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk skor tertinggi dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2020/2021 dengan skor 0.425 yang artinya perusahaan tersebut mengalami peningkatan dalam mengungkapkan informasi dimensi ekonomi pada tahun t dibandingkan tahun sebelumnya.

Terakhir adalah untuk variabel Y, dimana nilai terendah untuk *Effective Tax Rate* (ETR) tahun t dikurang dengan tahun t-1 adalah -0.169 dimiliki oleh PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk tahun 2020/2019, artinya ETR pada tahun t lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk nilai tertinggi ETR adalah 0.049 dimiliki oleh PT Kino Indonesia Tbk tahun 2020/2021.

Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis menggunakan regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk asumsi klasik yang terdiri dari uji Normalitas, Multikolonieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik seperti yang dirangkum pada Tabel 4. menunjukkan data dapat digunakan untuk pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda. Sebagaimana terlihat pada Tabel 4 data yang digunakan terdistribusi normal yang ditunjukkan dengan nilai KS yang tidak signifikan. Hasil analisis juga menunjukkan tidak adanya multikolinearitas pada penelitian ini yang ditunjukkan dari hasil nilai VIF dari variabel bebas tanggung jawab sosial dimensi ekonomi (X1), tanggung jawab sosial dimensi lingkungan (X2), dan tanggung jawab sosial dimensi sosial (X3) lebih kecil dari 10 dan nilai tolerancinya menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,1. Selanjutnya data juga menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model penelitian yang ditunjukkan dari hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser dimana seluruh variabel bebas memiliki angka signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Kemudian, data tidak menunjukkan terdapat gejala autokorelasi pada model regresi penelitian, Dimana hasil Uji Durbin-Watson, dengan ukuran sampel 38 data dan variabel bebas yang berjumlah 3 (tiga), memberi nilai Durbin-Watson hitung sebesar 1.836. Nilai Durbin-Watson hitung tersebut masih berada di antara nilai dU (1.6563) dan nilai 4 - dU.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Nama Uji	Metode	Kriteria	Hasil	Keterangan
Normalitas	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05	0.200	Data terdistribusi normal
Multikolonieritas	Collinearity Statistics	Tolerance > 0.1 VIF < 10	X1 2.394 X2 5.291	Tolerance VIF tidak terindikasi multikolonieritas 0.418 0.189

			X3	0.197		
			5.083			
Heteroskedastisitas	Uji Glejser	Sig. Var > 0.05	Sig	tidak terdapat gejala heteroskedastisitas		
			X1 0.776			
			X2 0.482			
			X3 0.633			
autokorelasi	Durbin-Watson (DW)	2 < dw < 4 – dU atau dU < d < 2	Nilai Durbin-Watson berada di antara nilai dU (1.6563) dan nilai 4 – dU	Durbin-hitung	Tidak ada autokorelasi	

Berikutnya analisis Regresi Linear Berganda menggunakan model berikut:

$$ETR = -0.019 + 0.963X_1 - 0.235X_2 - 0.047X_3 + \varepsilon$$

Seperti yang disajikan pada Tabel 5, hasil uji regresi berganda memberikan nilai F sebesar 5.798 dengan signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar ($\alpha = 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu tanggung jawab sosial dimensi ekonomi (X1), tanggung jawab sosial dimensi lingkungan (X2), dan tanggung jawab sosial dimensi sosial (X3) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) (Y).

Hasil pada Tabel 5 juga menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 33,8%. Data tersebut menunjukkan jika praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan sebesar 33,8% oleh variabel tanggung jawab sosial dimensi ekonomi, tanggung jawab sosial dimensi lingkungan, dan tanggung jawab sosial dimensi sosial. Sedangkan sisanya, yaitu 66,2% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

Kemudian Uji Statistik t menunjukkan Nilai t hitung tanggung jawab sosial dimensi ekonomi (X1) adalah sebesar 3.788 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 lebih kecil dari nilai alpha ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan variabel bebas tanggung jawab sosial dimensi ekonomi secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang berarti bahwa tanggung jawab sosial dimensi ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi skor pengungkapan dimensi ekonomi maka penghindaran pajak semakin rendah.

Sedangkan Nilai t hitung tanggung jawab sosial dimensi lingkungan (X2) adalah sebesar -2.271 dengan nilai signifikansi sebesar 0.030 lebih kecil dari nilai alpha ($\alpha = 0,05$), yang menunjukkan variabel bebas tanggung jawab sosial dimensi lingkungan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang berarti bahwa tanggung jawab sosial dimensi lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi skor pengungkapan dimensi lingkungan maka penghindaran pajak semakin tinggi.

Terakhir bahwa Nilai t hitung tanggung jawab sosial dimensi sosial (X3) adalah sebesar -0.417 dengan nilai signifikansi sebesar 0.679 lebih besar dari nilai alpha ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan variabel bebas tanggung jawab sosial dimensi sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Artinya dimensi sosial yang diungkapkan belum dapat membuktikan ada indikasi penghindaran pajak.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,027	3	0,009	5,798	.003 ^b
Residual	0,052	34	0,002		
Total	0,078	37			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-0,019	0,007		-2,703	0,011
	X1	0,963	0,254	0,818	3,788	0,001
	X2	-0,235	0,103	-0,729	-2,271	0,030
	X3	-0,047	0,113	-0,131	-0,417	0,679

a. Dependent Variable: Y

Pembahasan**Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Dimensi Ekonomi Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dimensi ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Setelah dilakukan Uji Statistik t didapat nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai tersebut berada di bawah nilai signifikansi alpha yaitu ($\alpha = 0,05$), sehingga Hipotesis 1 ditolak karena hasil ini menunjukkan tanggung jawab sosial dimensi ekonomi yang diukur dengan indikator pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) memiliki pengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Karena nilai ETR yang tinggi menunjukkan tidak adanya indikasi penghindaran pajak, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini tidak dapat menerima H1 yang menyatakan adanya hubungan positif antara tanggung jawab sosial dimensi ekonomi terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial dimensi ekonomi maka indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah.

Dalam teori legitimasi perusahaan berusaha menciptakan keselarasan antara nilai perusahaan dengan norma dalam masyarakat dikarenakan perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dimata masyarakat. Melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku adalah usaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan tidak merugikan berbagai pihak. Hasil dari penelitian ini selaras dengan usaha perusahaan yang dinyatakan dalam teori legitimasi dan hasil penelitian ini juga memberi dukungan bahwa tanggung jawab sosial dimensi ekonomi memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Septianto & Muid (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara tanggung jawab sosial dimensi ekonomi terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Namun temuan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan temuan Laguir et al (2015), Ranselaar (2016), Sari & Adiwibowo (2017) dan

Mohanadas et al (2019) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tanggung jawab sosial dimensi ekonomi terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Dimensi Lingkungan Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dimensi lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Setelah dilakukan Uji Statistik t didapat nilai signifikansi sebesar 0,030. Nilai tersebut berada di bawah nilai signifikansi alpha yaitu ($\alpha = 0,05$), namun demikian hasil menunjukkan X^2 memiliki nilai koefisien yang negatif, sehingga H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dimensi lingkungan yang diukur dengan indikator pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) memiliki pengaruh negatif terhadap nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Mengingat nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang tinggi menunjukkan tidak adanya indikasi penghindaran pajak maka hasil ini mendukung H2 yang menyatakan tanggung jawab sosial dimensi lingkungan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial dimensi lingkungan maka indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi.

Legitimasi adalah penerimaan pengakuan yang diterima oleh perusahaan yang diberikan oleh masyarakat, merupakan tujuan untuk memiliki reputasi yang baik di mata publik. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dan kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Jika tanggung jawab sosial dilakukan dengan membawa dampak negatif atau kerugian terhadap masyarakat dengan melanggar kepatuhan pembayaran pajak, maka aktivitas tanggung jawab sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai perlakuan curang yang dilakukan terhadap masyarakat, untuk mendapatkan pengakuan dengan mengabaikan aspek lainnya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranselaar (2016) dan Septianto & Muid (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tanggung jawab sosial dimensi ekonomi terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Dimensi Sosial Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dimensi sosial memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Setelah dilakukan Uji Statistik t didapat nilai signifikansi sebesar 0.679. Nilai tersebut berada di atas nilai signifikansi alpha yaitu ($\alpha = 0,05$), sehingga H3 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dimensi sosial yang diukur dengan indikator pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) tidak memiliki pengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Jadi hasil H3 ditolak dan artinya tanggung jawab sosial dimensi sosial tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan temuan Huseynov & Klamm (2012), Lanis (2013), Languir et al (2015), Ranselaar (2016), Sari & Adiwibowo (2017), Mohanadas et al (2019) dan Septianto & Muid (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara tanggung jawab sosial dimensi sosial terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

SIMPULAN

Penelitian dilakukan dengan maksud untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi sosial terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sosial dimensi ekonomi yang diukur dengan indikator pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Tanggung jawab sosial dimensi lingkungan yang diukur dengan indikator pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
3. Tanggung jawab sosial dimensi sosial yang diukur dengan indikator pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

Hasil tambahan dari penelitian ini menunjukkan ada peningkatan pengungkapan Laporan Keberlanjutannya dan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya respon positif dari perusahaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik, bagi Lembaga Jasa Keuangan berupa Perusahaan publik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 (Pasal 2).

Penelitian ini memiliki keterbatasan akses informasi terkait praktik Keberlanjutan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan belum menggunakan dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017, oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sektor usaha yang diteliti sehingga sampel yang diolah akan lebih besar jumlahnya atau penelitian dapat dilakukan kembali jika Standar GRI telah diberlakukan secara umum dan Laporan Keberlanjutan telah dipublikasikan oleh banyak perusahaan manufaktur di Indonesia

REFERENSI

- Budhi, N., Dharma, S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 529-556. www.bps.go.id
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 143-161.
- Dinah, A. F., & Darsono. (2017). Pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 1-15.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, N. (2010). Studi eksplorasi praktik corporate social responsibility serta motif yang terkandung didalamnya (kasus perusahaan go public dibursa efek indonesia). *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5.
- Hörisch, J., Schaltegger, S., & Freeman, R. E. (2020). Integrating stakeholder theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis. *Journal of Cleaner Production*, 275. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124097>

- Huang, D. Z. X. (2022). Environmental, social and governance factors and assessing firm value: valuation, signalling and stakeholder perspectives. *Accounting and Finance*, 62(S1), 1983–2010. <https://doi.org/10.1111/acfi.12849>
- Huseynov, F., & K.Klamm, B. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804–827.
- Jessica, & Toly, A. A. (2014). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak . *Tax & Accounting Review*, 4.
- Laguir, I., Staglianò, R., & Jamal, E. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 662–675.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *J. Acc. Public*, 31, 86–108.
- Lanis, R., Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal Accounting and Public Policy.*, 32, 68–88.
- Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2018). *Statistical techniques in business and economics (7th Edition)*. In *Journal of the Operational Research Society (7th Ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Eka Damayanthi, I. G. A. (2019). Pengaruh pengungkapan CSR, karakter eksekutif, profitabilitas, dan investasi aktiva tetap terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 833. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p26>
- Mohanadas, N. D., Salim, A. S. A., & Pheng, L. K. (2019). CSR and tax aggressiveness of Malaysian listed companies: evidence from an emerging economy. *Social Responsibility Journal*, 16, 597–612.
- Ningrum, A. K., Suprapti, E., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax avoidance dengan gender sebagai variabel moderasi (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). *Balance*, 15(1).
- Preuss, L. (2010). Tax avoidance and corporate social responsibility: You can't do both, or can you? *Emerald Group Publishing Limited*, 10, 365–374.
- Renselaar, J. van. (2016). The influence of corporate social responsibility on the level of corporate tax avoidance. *International Financial Management*, 6–8.
- Ribando, Ph. D. J. M., & Bonne, Ph. D. G. (2010). A New quality factor: finding alpha with asset4 ESG DATA.
- Sabrudin, D., & Suhendra, E. S. (2019). Dampak akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme paedagogik terhadap kinerja guru di SMKN 21 Jakarta. *JURNAL NUSAMBA*, 4, 38–52.
- Sandra, M. Y. D., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(11). <http://ejournal.umm>.
- Sari, L. L. P., & Adiwibowo, A. S. (2017). Pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Semuel, H., & Wijaya, E. (2008). Corporate social responsibility, purchase intention dan corporate image pada restoran di Surabaya dari perspektif pelanggan. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 3, 35–54.
- Septianto, N. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–13.
- Susanti, M. (2017). Corporate social responsibility, size, and tax avoidance. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 1639–1650.
- Watson, L. (2011). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: an examination of unrecognized tax benefits. Unpublished Working Paper.

Watson, L., & Huang, X.' "Beryl." (2015). Corporate social responsibility research in accounting. *Journal of Accounting Literature*, 34, 1-16.